

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya (Depitasari dkk, 2016). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Mahaputra dan Putra, 2014).

Pengungkapan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak

masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Juita, 2014). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Suwarjono (2005:165) dalam penelitiannya menyatakan Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Agar informasi tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi penggunaannya maka informasi tersebut harus bisa memenuhi kualitas tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun masih banyak temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik meningkat (Ponamon, 2015).

Perkembangan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Opini	Jumlah Pemda									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	WTP	-	-	-	-	2	5,6	8	22,2	11	30,6
2	WDP	29	93,6	36	100	33	91,7	27	75	25	69,4
3	TMP	2	6,4	-	-	1	2,7	1	2,8	-	-
4	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		31	100	36	100	36	100	36	100	36	100

Sumber: Ismiyati dan Widiyanto, (2017).

Ukuran kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 di wilayah Se-EKS Karisidenan Pati menunjukkan, terdapat 3 pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) dan sebanyak 2 Pemerintah daerah yang memperoleh opini *Wajar dengan Pengecualian* (WDP). Opini atas LKPD Tahun Anggaran 2017, relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 3 LKPD tahun 2017 yang meraih predikat WTP adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang. Pemerintah daerah yang mengalami penurunan dari WTP menjadi WDP yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lemahnya sistem pengendalian intern di kabupaten Blora dan Kabupaten Pati (Ismiyati dan Widiyanto, 2017). Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) pemanfaatan teknologi informasi; (2) komitmen organisasi; (3) kejelasan tujuan; (4) kompetensi sumber daya manusia; (5) sistem pengendalian intern (Ismiyati dan Widiyanto, 2017)..

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tingkat dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lingkungan pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset, menjamin tersajinya laporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien (Depitasari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian intern positif berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Selaras dengan penelitian Rahmadani (2015) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisol (2017) dan Putra (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu atau suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan suatu fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nasarudin, 2014). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci dari suatu keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten

untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga identitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memadai dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasi tentang pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda hasil dengan Ponamon (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi (Jugiyanto, 2012). Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan

yang berkualitas. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmadani (2015) dan Putra (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Bertolak belakang dengan penelitian Arif (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah daerah (Ponamon, 2015). Dalam implementasi pengelola keuangan daerah diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) mendapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah positif berpengaruh terhadap

kualitas informasi laporan keuangan. Selaras dengan penelitian Rahmadani (2015) penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisol (2017) dan Putra (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faisol (2018). Adapun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pertama adalah penambahan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Perbedaan kedua pada objek penelitian, penelitian sebelumnya pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati, dengan alasan agar mendapatkan gambaran yang berbeda atas penyajian informasi laporan keuangan pemerintahan setiap daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP**

KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Pati)’’.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern (X_1), kompetensi sumber daya manusia (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3), penerapan standar akuntansi pemerintah (X_4) dan variabel dependen adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y).
2. Obyek yang akan diteliti adalah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati.
2. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati.
3. Menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati.
4. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintahan

Terlihat bahwa sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah telah baik dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengujian ulang mengenai sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas informasi laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dimasa yang akan mendatang.

